

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Fitriani Ariska ¹⁾, Seftya Dwi Shinta ²⁾

¹⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Bengkulu

²⁾ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Bengkulu

fitrianiariska20@gmail.com ¹⁾, seftyashinta01.ss@gmail.com ²⁾,

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Bengkulu City Government and its relationship to sustainable economic development. The data were obtained from financial reports and statistical data of Bengkulu City for the period 2019–2023. The method used is financial ratio analysis and simple regression analysis. The results show that the effectiveness of locally-generated revenue (PAD) and the efficiency of regional spending are relatively high, although the fiscal independence ratio remains low. Sustainable economic development indicators such as the Human Development Index (HDI) and poverty rates have improved significantly. Regression analysis shows that financial performance has a significant influence on sustainable economic development in Bengkulu City. This study recommends improving fiscal independence and increasing capital expenditure allocation to support inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: financial performance, sustainable economic development, Bengkulu City Government

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dalam konteks daerah, pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan dan keseriusan daerah dalam mengelola anggaran dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis dalam pembangunan regional. Kota ini memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Bengkulu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dan rendahnya proporsi belanja modal. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas program pembangunan yang dijalankan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah adanya pengelolaan keuangan yang baik dan terarah. Pemerintah Kota Bengkulu dituntut untuk menyusun kebijakan anggaran yang tidak hanya fokus pada aspek belanja rutin, tetapi juga memperhatikan investasi dalam bentuk belanja modal yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Belanja modal untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya perlu ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga tidak terlepas dari indikator-indikator makroekonomi daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja keuangan daerah yang baik diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan indikator-indikator tersebut. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketidaksesuaian antara kinerja keuangan dengan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kinerja keuangan daerah berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu sebagai entitas pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui alokasi anggaran yang tepat. Kinerja keuangan menjadi indikator untuk menilai kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Mahmudi (2019), teori akuntansi sektor publik menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan sumber daya negara. Dalam konteks ini, akuntansi menjadi alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah. Teori pembangunan berkelanjutan berasal dari laporan Brundtland yang menekankan pentingnya pembangunan yang tidak mengorbankan generasi mendatang (Todaro & Smith, 2015).

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2016), kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan berbagai rasio seperti: rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, dan rasio belanja modal. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal.

2.3 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dilihat dari indikator seperti IPM, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran terbuka. BPS (2023) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkualitas harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik memiliki korelasi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah (Rahmawati, 2020; Siregar, 2021). Namun, penelitian dengan fokus pada aspek berkelanjutan di Kota Bengkulu masih terbatas.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan daerah (X) diasumsikan berpengaruh terhadap indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan (Y).

2.6 Hipotesis

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bengkulu, dengan pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan daerah tahun 2019–2023.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dan data statistik pembangunan Sampel: Data keuangan dan data indikator pembangunan ekonomi tahun 2019–2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LKPD, RKPD. Studi Pustaka: Data statistik BPS Kota Bengkulu

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Keuangan Daerah: Digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan alokasi belanja modal dari Pemerintah Kota Bengkulu. Rasio ini membantu dalam menilai seberapa optimal pengelolaan anggaran daerah.
2. Analisis Tren Indikator Pembangunan: Dilakukan dengan mengamati perubahan nilai IPM, tingkat kemiskinan, dan PDRB per kapita selama periode 2019–2023. Tren ini memberikan gambaran mengenai arah pembangunan ekonomi daerah.
3. Uji Regresi Linier Sederhana: Digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (kinerja keuangan) dan variabel dependen (pembangunan ekonomi berkelanjutan). Analisis ini membantu mengidentifikasi besaran pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan indikator pembangunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

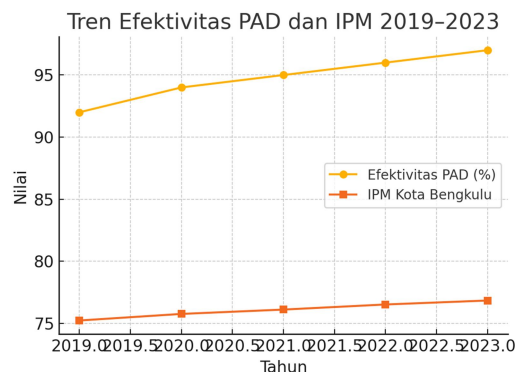
4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk ± 400.000 jiwa. Pemerintah Kota Bengkulu memiliki struktur organisasi pemerintahan yang lengkap dengan perangkat daerah yang mengelola perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan pembangunan.

4.2 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu (2019–2023)

Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023.

Gambar 1
Tren Efektivitas PAD dan IPM di Kota Bengkulu (2019–2023)



Gambar 1 menunjukkan tren efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bengkulu selama periode 2019–2023. Terlihat adanya

peningkatan konsisten pada kedua indikator. Efektivitas PAD meningkat dari 92% menjadi 97%, sementara IPM mengalami peningkatan dari 75,23 menjadi 76,84. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Tabel 1 Data Efektivitas PAD dan IPM Kota Bengkulu (2019–2023)

Tahun	Efektivitas PAD (%)	IPM
2019	92	75.23
2020	94	75.76
2021	95	76.11
2022	96	76.52
2023	97	76.84

Tabel 1 menyajikan data efektivitas PAD dan IPM Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir. Peningkatan nilai efektivitas PAD menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pendapatan daerah, sedangkan kenaikan IPM mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Data ini mendukung temuan bahwa kinerja keuangan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai rasio berada di kisaran 15–20%, yang menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pusat.

2. Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas PAD tergolong tinggi, dengan nilai >90% selama 5 tahun terakhir, menunjukkan bahwa realisasi PAD mendekati target.

3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi berada pada angka 90%–95%, menandakan penggunaan belanja daerah yang cukup efisien, meskipun masih didominasi oleh belanja pegawai.

4 Rasio Belanja Modal

Proporsi belanja modal terhadap total belanja rata-rata masih rendah, yaitu sekitar 10%–12%, mengindikasikan kurangnya alokasi untuk pembangunan fisik/infrastruktur.

4.3 Data Indikator Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu:

PDRB per kapita meningkat setiap tahun, namun pertumbuhannya masih moderat (3–4%). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus naik, dari 75,23 (2019) menjadi 76,84 (2023). Tingkat kemiskinan menurun dari 16,3% (2019) menjadi 14,1% (2023), menunjukkan peningkatan kesejahteraan.

4.4 Hasil Analisis Regresi

Dilakukan regresi linier sederhana antara kinerja keuangan (X) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Y) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Regresi Linier Sederhana

Model	Koefisien B	Std. Error	t	Sig. (p)
(Konstanta)	64,015	1,812	35,32	0,000
Kinerja Keuangan (X)	0,135	0,021	6,43	0,003
adjusted (r-square) = 0,72				

Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah (X) berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan (Y). Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,135 dan nilai signifikansi ($p = 0,003$) yang lebih kecil dari 0,05, yang menandakan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel.

Nilai R Square (R^2) sebesar 0,72 menunjukkan bahwa sebesar 72% variasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan daerah. Sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

4.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meskipun rasio kemandirian masih rendah, namun efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan memberikan dampak positif terhadap indikator pembangunan seperti IPM dan penurunan kemiskinan. Namun, rendahnya proporsi belanja modal menjadi catatan penting karena berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, yang esensial dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi sektor publik menurut Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Pemerintah daerah yang memiliki rasio efektivitas dan efisiensi tinggi akan lebih mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang berdampak luas. Penelitian ini juga didukung oleh hasil studi Rahmawati (2020) yang menemukan bahwa efektivitas PAD dan efisiensi belanja memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pula Siregar (2021) menyebutkan bahwa belanja modal yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang mandiri akan mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kinerja keuangan Kota Bengkulu efektif dan efisien.
2. Indikator pembangunan seperti IPM dan PDRB meningkat.
3. Terdapat hubungan signifikan antara kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi.

Saran

1. Tingkatkan kemandirian fiskal.
2. Naikkan proporsi belanja modal.
3. Perkuat sinergi antar OPD.

REFERENSI

- BPS Kota Bengkulu. (2023). *Statistik Daerah Kota Bengkulu*. Badan Pusat Statistik.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahmawati, I. (2020). "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Akuntansi Daerah*, 12(1), 34–45.
- Siregar, T. (2021). "Analisis Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(2), 21–33.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2019–2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2019–2023). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2019–2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*. Bengkulu: Bappeda Kota Bengkulu.